

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Tempo

Jalan Berkelok Pendamping Anies

PEMILIHAN Wakil Gubernur DKI Jakarta, pengganti Sandiaga Uno, penuh dinamika. Bahkan setelah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta memilih Ahmad Riza Patria, polemik belum berakhir. Ombudsman perwakilan Jakarta Raya menduga ada pelanggaran administrasi yang terjadi dalam pencalonan Ahmad Riza.

November 2019

Partai Gerindra tiba-tiba mengumumkan empat nama calon wakil gubernur pengganti salah satu dari dua kader Partai Keadilan Sejahtera yang lebih dulu diusulkan sebagai pengganti Sandiaga Salahuddin Uno, yaitu Ahmad Syaikhul dan Agung Yulianto. Empat nama yang dicalonkan Partai Gerindra adalah Ahmad Riza Patria, Ferry Juliantono, Arnes Lukman, dan Saefullah.

Awal Januari 2020

Secara tertutup, PKS menyampaikan persetujuan untuk pengajuan Riza kepada Partai Gerindra.

20 Januari 2020

Partai Gerindra, tanpa kesepakatan dengan PKS, mengumumkan nama Riza dan Nurmansjah Lubis sebagai nama calon wakil gubernur yang baru. PKS menilai pengumuman seharusnya bukan hari itu.

Februari 2020

Sekretariat DPRD membatalkan tiga kali agenda rapat pimpinan gabungan untuk pembentukan panitia pemilihan wakil gubernur karena Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi sakit.

Akhir Februari 2020

Tarik-ulur di internal DPRD terjadi untuk menyusun pimpinan Panitia Pemilihan Wakil Gubernur. Akhirnya, Farazandi Fidinansyah dari Fraksi PAN terpilih sebagai ketua dengan wakil dari Fraksi Golkar, Basri Baco.

Maret 2020

Rencana rapat paripurna pemilihan wakil gubernur pun mengalami dua kali pembatalan akibat isu Covid-19. Awalnya rapat ini akan digelar pada 23 atau 27 Maret 2020, kemudian diputuskan dan terlaksana pada 6 April 2020.

3 April 2020

DPRD tetap menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Riza dan Nurmansjah secara jarak jauh dan online. Mereka tak mengindahkan permintaan Fraksi PKS dan Fraksi PSI untuk menggelar acara tersebut secara terbuka bagi masyarakat.

6 April 2020

Fraksi PSI menolak hadir dalam rapat paripurna pemilihan karena DPRD tak memberikan akses bagi wartawan dan masyarakat untuk mengikuti acara tersebut. DPRD kemudian menyiarkan acara pemilihan tersebut secara daring. Imbas polemik tersebut, Ketua DPRD mengusir dan mencabut hak pilih enam anggota Fraksi PSI karena telat mengisi daftar hadir rapat paripurna.

7 April 2020

Ketua Ombudsman perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho, akan memanggil dan memeriksa panitia pemilihan dengan dugaan maladministrasi karena menerima pencalonan Riza meski tanpa surat pengesahan Presiden Joko Widodo.